



Penerapan Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Leyli Desra Asrol¹, Yahya², Hadiyanto³

¹ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

^{2,3} Universitas Negeri Padang, Padang

Corresponding Author: ✉ leylidesra@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) Implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan; 2) Hambatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya di SMP N 1 Kinali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMP N 1 Kinali Kabupaten Majalengka sudah efektif. Hal ini terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut: 1) Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendidikan dilakukan secara matang; 2) Pembiayaan pendidikan dilakukan berdasarkan juklak dan juknis BOS, dan 3) Pengawasan anggaran dilakukan secara efektif; 4) Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan 5) Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan

Keywords

BOS, Pembiayaan Pendidikan, Kualitas Pendidikan

How to cite

(2022). *Jurnal Ability*, 3(3).

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap lulusan yang berkualitas dan pelayanan lembaga pendidikan semakin mendesak karena persaingan di pasar kerja yang semakin ketat. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan adalah deregulasi yang memungkinkan lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu, persaingan antara penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin masif. Dalam mengantisipasi perubahan yang cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, diperlukan upaya peningkatan daya saing lulusan serta produk dan layanan akademik lainnya bagi lembaga

pendidikan. Hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas manajerial pendidikan (Yuliana, 2018).

Kualitas adalah sifat barang dan jasa. Setiap orang selalu mengharapkan dan bahkan menuntut kualitas dari orang lain; di sisi lain, orang lain masih mengharapkan dan menuntut kualitas. Artinya kualitas bukanlah sesuatu yang baru karena merupakan naluri manusia (Kováč, 2012; Kuo, 1921). Kualitas barang dan jasa sebagai produk dituntut agar orang lain yang menggunakannya puas. Dengan demikian, kualitas adalah kombinasi dari karakteristik barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan tersurat maupun tersirat. Benda dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar disebut "kinerja". Kinerja merupakan tuntutan kualitas, sehingga muncul istilah "kualitas kinerja manusia" (May dkk, 2020). Suatu implementasi disebut kualitas jika dapat memenuhi atau melampaui kebutuhan dan harapan pelanggannya. Oleh karena itu, suatu produk atau jasa sebagai kinerja harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya.

Pelanggan jasa pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur minimal empat kelompok sebagaimana dikemukakan oleh MS Farooq, MS Akhtar & Memon (2007), antara lain: Pertama, yang belajar dapat menjadi siswa/murid/peserta studi yang disebut sebagai eksternal primer pelanggan. Merekalah yang secara langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga-lembaga tersebut. Kedua, klien berkaitan dengan orang yang menyekolahkan ke lembaga pendidikan yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan kita menyebutnya sebagai pelanggan eksternal sekunder. Pelanggan lain yang tersier adalah pekerjaan. Bisa pemerintah atau masyarakat pengguna hasil pendidikan (pelanggan eksternal tersier). Selain itu, keempat, dalam hubungan institusional, masih ada pelanggan lain dari internal institusi. Mereka adalah guru/dosen/tutor.

Di antara masalah mendasar dalam administrasi pendidikan adalah ekonomi pendidikan (Deveci & Gunduz, 2012). Dalam skala mikro, studi ini berfokus pada masalah pembiayaan pendidikan, termasuk pendapatan, alokasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berapa biaya yang harus dihitung dan dikeluarkan, dimana mendapatkannya, prioritas apa yang harus didahulukan, dan bagaimana mengoptimalkan semua sumber dayanya. Mangkunegara & Prabu (2009) berpendapat bahwa pendanaan pendidikan adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut bagaimana mencari sumber dana dan bagaimana menggunakannya. Selain itu, profesionalisme guru harus

didukung oleh standar kompetensi yang harus dikuasai oleh guru profesional (Bunyamin, 2016; Taniredja & Abduh, 2016).

Menurut Surya (2004), guru yang profesional harus menguasai kemampuan materi ilmiah dan keterampilan metodologis. Mereka juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga, dan organisasi profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kebersamaan yang tinggi dengan sesama guru. Di sinilah peran perguruan tinggi dan organisasi profesi guru (seperti PGRI atau yang dikenal dengan Persatuan Guru Indonesia) sangat penting. Untuk itu, pengembangan profesionalisme guru juga harus menuntut kehidupan dan peran organisasi profesi tenaga pengajar lainnya (Tanang & Abu, 2014).

Selanjutnya untuk melihat kualitas pendidikan dari segi prestasi akademik yaitu Ujian Nasional SMP N 1 Kinali, UN SMP N 1 Kinali fluktuatif, namun nilai mereka di tahun 2019 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun nilai yang diperoleh tidak sesuai harapan. Hal ini diduga karena beberapa faktor, seperti kualitas pendidikan dan pendanaan pendidikan yang setiap tahun meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah "Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi di SMP N 1 Kinali)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek apa adanya (lihat Apriyanto dkk., 2020; Hidayat dkk., 2019; Apriyanto & Nurhayaty, 2019; Elliott & Timulak, 2015; Nassaji, , 2015; Silverman, 2013). Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data (misalnya, Apriyanto & Anum, 2018). Penulis melakukan penelitian di SMP N 1 Kinali. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Kinali Kabupaten Majalengka. Dalam proses menganalisis penelitian dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Dana BOS di SMP N 1 Kinali Kabupaten Majalengka

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMP N 1 Kinali Kabupaten Majalengka berjalan efektif, hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut:

- a. Setiap tahun menyusun RAPBS yang disahkan menjadi APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- b. Penyusunan RAPBS selalu berpedoman pada pedoman kerja sekolah sehingga penyusunan tersebut juga mencakup kelengkapan perangkat supervisi. Alat pengawasannya adalah pembentukan badan pengawas anggaran.
- c. APBS telah disusun dan akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah setiap tahun.
- d. Dalam penyusunan RAPBS selalu menggunakan berbagai strategi, biasanya menggunakan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.
- e. RAPBS tahunan yang disusun, dan RAPBS tersebut kemudian disahkan menjadi APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- f. Penyusunan RAPBS selalu berpedoman pada pedoman kerja sekolah.
- g. Dalam penyusunan RAPBS/APBS juga mencakup kelengkapan alat pengawasan. Ini adalah pembentukan badan pengawas anggaran.
- h. APBS telah disusun dan akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah setiap tahun.
- i. Menggunakan berbagai strategi untuk menyusun RAPBS, biasanya menggunakan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.
- j. Setiap tahun kami mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 1.400.000,- yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Dana BOS bermanfaat untuk keuangan sekolah; hampir 80% keuangan kami berasal dari dana BOS.
- k. Selain dana BOS, kami juga menerima dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan bulanan komite sekolah.
- l. Memiliki pendapatan pembiayaan pendidikan dari pemerintah dan masyarakat, tetapi sumber pembiayaan lain seperti bantuan dari pihak swasta.
- m. BOS memiliki sistem dan prosedur akuntansi dan penganggaran yang sangat rapi berdasarkan Website dan berdasarkan laporan fisik dalam hal pertanggungjawaban.

- n. Dalam pelaksanaan BOS diperlukan penanggung jawab penerima dan pengeluaran anggaran. Penanggung jawab adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah.
- o. Dalam pemilihan bendahara BOS dapat berasal dari guru atau tenaga administrasi. Pengangkatan bendahara BOS didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan, dan bendahara tersebut harus ahli di bidang akuntansi keuangan. Selain formal, kami juga memberikan persyaratan khusus yaitu amanat.
- p. Dalam pelaksanaan BOS, pemerintah pusat menetapkan mekanisme dan prosedur anggaran pendapatan dan belanja. Kami hanya mengeluarkan belanja sesuai dengan panduan pengguna.
- q. Dalam pelaksanaan BOS harus ada komunikasi dan kerjasama. Kami selalu berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Di sisi lain, kami juga bekerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan BOS secara tepat dan memadai.
- r. BOS memiliki prinsip pengawasan anggaran, yaitu 11 prinsip anggaran.
- s. Audit dilakukan oleh tim audit internal dan tim audit eksternal.
- t. SMP N 1 Kinali melaksanakan audit yang dilakukan oleh tim audit internal dan tim audit eksternal. Pihak sekolah sendiri membentuk tim audit internal, dan tim tersebut melaksanakan tim audit eksternal dari dinas pendidikan provinsi atau instansi pemerintah yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- u. SMP N 1 Kinali selalu melakukan pengawasan internal, dan kami membentuk tim audit internal dan tim pengawas internal BOS.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik tahun 2017 dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2017 Di SMA Islam Dempo Timur Pasean, Pamekasan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS SMA Islam Dempo Timur melaksanakan penyusunan RKAS dan RAB. (2) Menerapkan dana BOS SMA Islam Dempo Timur untuk menyalurkan dana setiap triwulan. Sementara penarikan dana dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah. Penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non personalia. Kemudian pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang/jasa. Pembukuan yang dilakukan bendahara berdasarkan bukti (3) dilakukan secara internal, dan eksternal (4) pelaporan dana dilakukan setiap semester.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan memudahkan siswa lain untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas hingga lulus dalam rangka menyelesaikan wajib belajar

sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah seluruh sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran ingin berfungsi sebagai alat dalam perencanaan dan pengendalian, sehingga anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sebuah. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam menjalankan anggaran.
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
- d. Adanya dukungan dari pelaksana dari atas ke bawah (Fattah, 2000).

Keempat poin di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berada dalam kategori sehat. Isu penting dalam penyusunan anggaran adalah penggunaan dana secara efisien dan alokasi yang tepat, sesuai dengan skala prioritas.

Alokasi dana BOS dilakukan sebagai berikut:

- a. sebuah. Tim Pusat PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM) mendata jumlah siswa setiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM di provinsi, dan kabupaten/kota kemudian menentukan alokasi dana BOS untuk masing-masing provinsi.
- b. Berdasarkan data jumlah siswa per sekolah, Tim Pusat PKPS-BBM mengalokasikan dana BOS untuk setiap provinsi.
- c. Tim PKPS-BBM Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota diharapkan melakukan verifikasi ulang terhadap data jumlah siswa setiap sekolah sebagai dasar penentuan alokasi di masing-masing sekolah.
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kandepag Kabupaten/Kota, dan Dewan Pendidikan yang dilampiri daftar nama sekolah dan nama sekolah. jumlah bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Bantuan (SPPB).
- e. Tim PKPS-BBM kabupaten/kota mengirimkan surat keputusan alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah kepada Tim PKPS-BBM provinsi, tembusan ke Pos/ Bank penerima BOS dan Sekolah.

Dalam menentukan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah perlu diperhatikan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda.

- a. Penarikan Dana BOS
 - 1) Tim PKPS-BBM Provinsi menyampaikan data rekening sekolah penerima BOS dan jumlah dana yang disalurkan ke Kantor Pos atau Bank Pemerintah.

- 2) Selanjutnya, kantor Pos/Bank pemerintah yang ditunjuk mentransfer dana secara bersamaan ke masing-masing sekolah.
 - 3) Dana BOS ditarik oleh kepala sekolah yang dipantau oleh ketua komite sekolah. Bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. d. Dana BOS harus diterima secara penuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM kabupaten/kota.
- b. Pembatalan Dana BOS

Jika sekolah penerima BOS berubah dan tidak termasuk dalam kategori penerima BOS. persyaratan, bantuan dibatalkan, dan dana BOS harus disetorkan kembali ke kas negara. Tim PKPS-BBM kabupaten atau kota bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkannya. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku penyalahgunaan dana BOS, maka tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian suatu tindak pidana bukanlah masalah pertanggungjawaban (Liivoja, 2010; UNODC, 2011). Suatu tindak pidana hanya menunjukkan larangan dari suatu perbuatan.

Hambatan Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Kinali

Dalam mengelola dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan, SMP N 1 Kinali memiliki kendala sebagai berikut:

- a. BOS selalu datang terlambat, sehingga kami harus menggunakan dana cadangan, yang terkadang dipinjam dari individu;
- b. Pengeluaran dana BOS terbatas pada pengeluaran yang telah ditetapkan berdasarkan juklak dan juknis sehingga terdapat pos-pos yang tidak tercakup oleh dana BOS;
- c. Pembayaran dengan sistem TNT (Non-Cash Transfer) membuat pembayaran cukup merepotkan karena tidak semua perusahaan/perorangan memiliki rekening bank, dan tidak semua yang memiliki rekening bank memiliki NPWP atau NPWP;
- d. Kendala lain ketika kita menyadari pembayaran suatu barang harus mengikuti anggaran sehingga jika ada kekurangan harus ditambah. Di sisi lain, jika harga di bawah rencana, sisanya harus dikembalikan. Kita tahu bahwa harga barang selalu dinamis.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Kinali

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam mengatasi keterlambatan pencairan BOS, SMP N 1 Kinali mengupayakan dana talangan dari dana komite sekolah, koperasi sekolah, pegawai, dan koperasi mahasiswa. Dan uang yang tidak terpakai untuk keperluan operasional sekolah terpenuhi dan kami akan segera membayar jika dana BOS sudah ditransfer.
- b. SMP N 1 Kinali tetap melaksanakan juknis sesuai prosedur, meliputi pembelajaran di luar juklak dan juknis. Terkadang kita mencari sumber dana lain di luar BOS, misalnya dana komite sekolah. Selain itu, kami tidak diperbolehkan menggunakan dana tunjangan dari belanja BOS.
- c. SMP N 1 Kinali berusaha mencari toko/perusahaan yang memiliki rekening bank dan memiliki NPWP untuk melakukan TNT. Namun jika tidak mendapatkannya, pihaknya akan bekerja sama dengan toko/perusahaan agar TNT bisa dilakukan tetapi melalui perusahaan lain. Perusahaan memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan lain yang tidak memiliki rekening dan NPWP.
- d. Untuk mengatasi realisasi barang yang tidak sesuai dengan harga yang dianggarkan, petugas SMP N 1 Kinali selalu mencari harga yang terjangkau sesuai dengan anggaran dengan melobi penjual untuk memberikan harga. Jika tidak berhasil, kami siap mengembalikannya ke kas negara, tetapi biasanya ditutup dengan keuangan komite sekolah jika ada kekurangan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan melalui Dana BOS di SMP N 1 Kinali Kabupaten Majalengka berjalan efektif. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti perencanaan penyusunan Anggaran Biaya Pendidikan dilakukan dengan matang, pembiayaan pendidikan dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis BOS, dan pengawasan anggaran dilakukan efektif.

Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan adalah BOS selalu datang terlambat, pengeluaran BOS terbatas pada pengeluaran yang telah ditentukan berdasarkan juklak dan juknis, pembayaran menggunakan TNT (Non Tunai Transfer) sistem membuat pembayaran cukup repot, dan sebenarnya pembayaran suatu barang harus mengikuti budget sehingga jika ada kekurangan harus ditambah, sebaliknya jika harga dibawah rencana selebihnya harus dikembalikan .

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain: pertama, dalam mengatasi

keterlambatan pencairan BOS, beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasinya seperti mencari dana talangan dari pihak sekolah. dana komite, koperasi sekolah baik pegawai maupun koperasi siswa, dan dari perseorangan yang memiliki uang tidak terpakai, sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat dipenuhi dan segera dibayarkan jika dana BOS dicairkan; kedua, tetap melaksanakan juknis sesuai prosedur, untuk menutupi pembelajaran di luar juknis, kami mencari sumber dana lain di luar BOS, misalnya dari komite sekolah. Di samping itu, terkadang kami tidak diperbolehkan menggunakan dana cadangan dari belanja BOS; ketiga, berusaha semaksimal mungkin mencari toko/perusahaan yang memiliki rekening bank dan memiliki NPWP untuk melakukan TNT atau transfer non tunai.

Namun, sekolah tidak dapat menemukannya, kemudian mereka akan bekerja sama dengan toko/perusahaan agar TNT dapat dilakukan tetapi melalui perusahaan lain. Perusahaan memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan yang tidak memiliki rekening dan NPWP; dan keempat, untuk mengatasi realisasi barang yang tidak sesuai dengan harga dalam anggaran, kami selalu mencari harga yang di bawah anggaran dengan melobi penjual untuk memberikan harga sesuai anggaran yang ada. Jika kondisi ini tidak berhasil, kami siap kembalikan ke kas negara. Selain itu, jika ada kekurangan dari harga kami, sekolah biasanya menutupinya dengan keuangan komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, S., & Anum, A. (2018). Dinamika Gender pada Interaksi Berbicara di Ruang Kelas Perguruan Tinggi. *Jurnal Cerdas*, 4(2), 73.
- Apriyanto, S., Dalman, & Santoso, D. (2020). Urgensi linguistik forensik dalam proses interogasi polisi. *Jurnal Internasional Rehabilitasi Psikososial*, 24(6), 4766-4772.
- Apriyanto, S., & Nurhayaty, A. (2019). Lahir Dalam Budaya Media Sosial: Kepribadian Fitur Dampak Dalam Konteks Komunikasi. Dalam Y. Nasucha (Ed.), *icollit* (hal. 167- 175). Pers UMS. icollit.ums.ac.id/2018
- Bunyamin. (2016). PROFESIONALISME GURU: STUDI TENTANG GURU KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGOGIK SMK DI PANTAI UTARA JAKARTA. *IJER*, 2(1), 77-84.
- Chan, L. (1997). *PENGANGGARAN BERBASIS SEKOLAH : MODEL MANFAAT BIAYA*.
- Chandra, T., Ng, M., Chandra, S., & Priyono. (2018). Pengaruh kualitas layanan pada kepuasan siswa dan loyalitas siswa: Sebuah studi empiris. *Jurnal Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial*, 9(3), 109-131.

- Deveci, A., & Gunduz, HB (2012). Masalah Pendidikan dan Administrasi Ditemukan di Sekolah oleh Siswa Turki di Denmark. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 46, 5805–5810.
- Ekosusilo, M. (2020). Dampak budaya organisasi, kompensasi pada pekerjaan kepuasan, dan motivasi kerja terhadap kinerja kepala sekolah di Indonesia: Peran mediasi praktik rantai pasok. *Jurnal Internasional Manajemen Rantai Pasokan*, 9(1), 765–773.
- Elliott, R., & Timulak, L. (2015). Pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk kualitatif riset. Dalam JM dan P. Gilbert (Ed.), *Buku Pegangan Metode Penelitian Psikologi Klinis dan Kesehatan* (hlm. 147–157). Pers Universitas Oxford.
- Fajarwati, D., Raharjo, TJ, & Samsudi. (2016). Implementasi Multiple Manajemen Sekolah Berbasis Intelijen. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 4 (1), 31–36.
- Fattah, N. (2000). *ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Hayes, CD, & Keller, E. (2009). Sebuah alat estimasi biaya untuk sekolah charter. *Keuangan Proyek*, Oktober, 1–24.
- Hidayat, O., Apriyanto, S., Program, P., Science, A., Tun, U., & Onn, H. (2019). Drama Kutipan : Alat dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara untuk Sekolah Menengah Pertama. 2(3), 1–9.
- Ibrahim, A., & Amatullah, S. (2018). Menerapkan Manajemen Hubungan Pelanggan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dengan Metode Service Quality. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Intelijen Bisnis*, 4(2), 148.
- Karim, MA, Roesminingsih, E., & Soedjarwo. (2020). PENGARUH DIMENSI KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP EFIKASI DIRI GURU. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, IX(2), 18–34.
- Kováč, L. (2012). Biologi kebahagiaan. Mengejar kesenangan dan takdir manusia. *EMBO Laporan*, 13(4), 297–302.
- Kuo, ZY (1921). Melepaskan Naluri dalam Psikologi. *Jurnal Filsafat*, 18(24), 645.
- Liivoja, R. (2010). Yurisdiksi kriminal negara-negara bagian. *tidak ada*, 7.
- M. Gibson, A. (2009). Penganggaran di Perguruan Tinggi. *Manajemen akunting*, 2 (Januari), 2009.
- MS Farooq, MS Akhtar, SZU, & Memon, RA (2007). Penerapan Total Quality Management Pada Perpustakaan. *Jurnal Manajemen Mutu dan Teknologi*, 3 (2), 87–97.
- Mangkunegara, AP, & Prabu, A. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. PT. Remaja Rosdakarya.

- May, LF, Abdurrahman, A., Hariri, H., Sowiyah, S., & Rahman, B. (2020). Itu Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru pada Sekolah-sekolah di Bandar Lampung. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 5(1), 121-130.
- Nassaji, H. (2015). Penelitian kualitatif dan deskriptif: Jenis data versus analisis data. *Penelitian Pengajaran Bahasa*, 19(2), 129-132.
- Ramadhani, SP (2020). MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL DI KELAS IV SDN MANGGARAI 09 PAGI JAKARTA SELATAN. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, IX(2), 73-90.
- Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2016). *Pembiayaan Pendidikan*. OurWorldInData.Org.
- Saputra, A. (2018). Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia. *Budapest Internasional Lembaga Penelitian dan Kritik (BIRCI-Journal): Humaniora dan Ilmu Sosial*, 1(2), 141-147.
- Siahaan, D., Iswati, S., & Zarkasyi, AF (2019). Perusahaan Sosial: Alternatif Dukungan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Masalah Keuangan*, 9(3), 1-11.
- Silverman, D. (2013). *Melakukan Riset Kualitatif* (Katie Metzler (ed.); Edi keempat). Publikasi SAGE.
- Surya, M. (2004). *Psikologi pembelajaran dan pengajaran*. Pustaka Bani Quraisy.
- Tanang, H., & Abu, B. (2014). Profesionalisme dan Pengembangan Profesional Guru Praktek di Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Kurikulum dan Pengajaran*, 3(2), 25- 42.
- Taniredja, T., & Abduh, M. (2016). Pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional kompetensi dalam korelasi dengan kinerja guru (studi korelasional guru SMP di SMPN 3 purwokerto). *Konferensi Internasional ke-2 tentang Sains, Teknologi, dan Kemanusiaan*, Januari, 264-272.
- UNODC. (2011). *Buku Pegangan tentang akuntabilitas, pengawasan dan integritas polisi*. DiPidana Seri Buku Pegangan Keadilan. www.unodc.org
- Waseem, M., Ryan, M., Foster, CB, & Peterson, J. (2013). Penilaian dan manajemen anak-anak yang diintimidasi di unit gawat darurat. *Perawatan Gawat Darurat Anak*, 29(3), 389- 398.
- Yuliana, ATRD (2018). Pembentukan Pola Pikir Pendidikan Total Quality at SD Muhammadiyah Kleco Yogyakarta. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 3(1), 67